KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Istana Ngebet RUU Tax Amnesti Dibahas di Senayan
Tanggal : Minggu, 20 Maret 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Istana Ngebet RUU Tax Amnesti Dibahas Di Senayan

RANCANGAN Undangan-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amenesty belum juga dibahas dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin. Pemerintah berharap RUU ini segera dibahas dan disahkan menjadi UU. Aturan tersebut bertujuan untuk peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 1.364 triliun atau 34 persen dibanding tahun lalu.

"Kami berharap DPR memahami kepentingan pemerintah tentang aturan tax amnesty untuk pembangunan nasional," ujar Kepala Staf Presiden Teten Masduki di kantornya.

Ia mengatakan, kepentingan pemerintah yang utama dalam aturan ini adalah mendapatkan dana seoptimal mungkin untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah kata dia juga menargetkan peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 1.364 triliun.

"Pemerintah berharap target itu dicapai salah satunya dengan pengampunan pajak tersebut. Dengan begitu dapat membuka investasi pertumbuhan ekonomi. Kami butuh pertumbuhan ekonomi besar, karena angka penganggur-an kita cukup besar," ujar Teten.

Namun pemerintah kata Teten tidak mematok target pembahasan RUU tersebut kapan rampung. Semuanya bergantung pada kerja DPR. "Kami ingin secepatnya dibahas dan disahkan. Sehingga apa yang ditargetkan bisa dicapai," ujar Teten.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berharap, pembahasan RUU Pengampunan Pajak dapat selesai pada Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat yang akan berlangsung April-Juni mendatang. "Mudah-mudahan itu bisa selesai di masa sidang berikutnya," ujar Bambang.

Bambang mengungkapkan, pemerintah telah melakukan pembicaraan secara intensif dengan DPR terkait peraturan yang bertujuan untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak.

"Dari yang paling tinggi, yang kurang tinggi, yang setengah tinggi, semua sudah dilakukan dan dikomunikasikan," katanya.

Pada rapat paripurna DPR Februari lalu, Surat Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty telah dibacakan kepada seluruh anggota dewan. DPR telah menerima naskah akademik sekaligus draf RUU tersebut untuk kemudian dibahas

Draf RUU itu akan dibahas di Badan Musyawarah untuk diambil keputusan mengenai kelanjutan dari pembahasan RUU itu. Belied yang diyakini dapat mengembalikan seluruh aset orang Indonesia di luar negeri itu masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016.

Namun sayangnya, RUU tersebut belum juga diputuskan oleh pimpinan DPR karena fraksi-fraksi yang ada pun belum semuanya menyetujui RUU tersebut dibahas. ■ KAL/NET